

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya diukur dalam kurun waktu 30 tahun atau lebih. Unsur-unsur yang membentuk iklim meliputi suhu udara, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan atmosfer. Berbeda dengan cuaca yang bersifat harian dan berubah-ubah, iklim bersifat lebih tetap dan mencerminkan pola cuaca jangka panjang yang berulang. Berdasarkan garis lintang dan suhu, iklim di dunia terbagi ke dalam beberapa zona utama. Indonesia yang berada dalam zona iklim tropis, mengalami dua musim dominan sepanjang tahun yang berlangsung secara bergantian dipengaruhi oleh angin muson, dengan suhu dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi iklim di wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geografis, ketinggian, serta keberadaan pegunungan dan laut yang mengelilinginya.

Saat ini, perubahan iklim global menjadi isu penting yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, alih fungsi lahan melalui deforestasi, serta kegiatan industri yang tidak berorientasi pada keberlanjutan. Kondisi ini mengganggu stabilitas lingkungan dan turut memengaruhi pola cuaca secara menyeluruh. Kegiatan tersebut turut mendorong akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang berperan dalam mempercepat proses pemanasan global yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memerangkap panas di atmosfer Bumi. Akumulasi gas-gas tersebut merupakan faktor signifikan yang turut mendorong terjadinya peningkatan suhu rata-rata global. Secara global, perhatian terhadap isu perubahan iklim semakin meningkat. Hal ini tercermin dari berbagai kesepakatan internasional yang telah diambil oleh banyak negara untuk mengurangi dampak krisis iklim.

Salah satu langkah penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim secara global adalah adanya *Paris Agreement* yang disepakati dalam forum Conference of Parties (COP) 21 tahun 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional, yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030.

Komitmen ini dituangkan dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*) dan menjadi dasar arah kebijakan nasional terkait iklim. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membatasi peningkatan suhu global agar tidak melebihi 2°C, bahkan diupayakan maksimal 1,5°C, demi meminimalisir dampak krisis iklim di masa mendatang (UNFCCC, 2015).

Selain melalui *Paris Agreement*, komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim juga tercermin dalam agenda pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kesepakatan global mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menggantikan MDGs (*Millennium Development Goals*) dan berlaku pada periode 2015–2030. Kesepakatan ini melibatkan lebih dari 190 negara dan mencakup 17 tujuan serta 169 sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yang mendukung pencapaian salah satu tujuan SDGs, yakni aksi terhadap perubahan iklim, khususnya dalam meningkatkan ketahanan serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional ke-13 berfokus pada pengambilan tindakan cepat untuk menghadapi perubahan iklim. Guna mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, telah ditetapkan lima target yang diukur melalui delapan indikator. Target tersebut mencakup upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), penurunan jumlah korban akibat bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dirancang dan diimplementasikan, baik oleh pemerintah maupun pihak nonpemerintah, sebagai bentuk langkah konkret untuk mencapai targettarget tersebut.

Namun, dalam konteks lokal, implementasinya masih sering menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat serta efektivitas program di tingkat daerah. Di Indonesia dari periode normal 1991-2020, anomali suhu rata-rata nasional meningkat sekitar +0,8°C. Sebagai wujud komitmen dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen baru dengan menaikkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga mencapai 31,89% secara mandiri pada tahun 2030. Di samping itu, dengan adanya

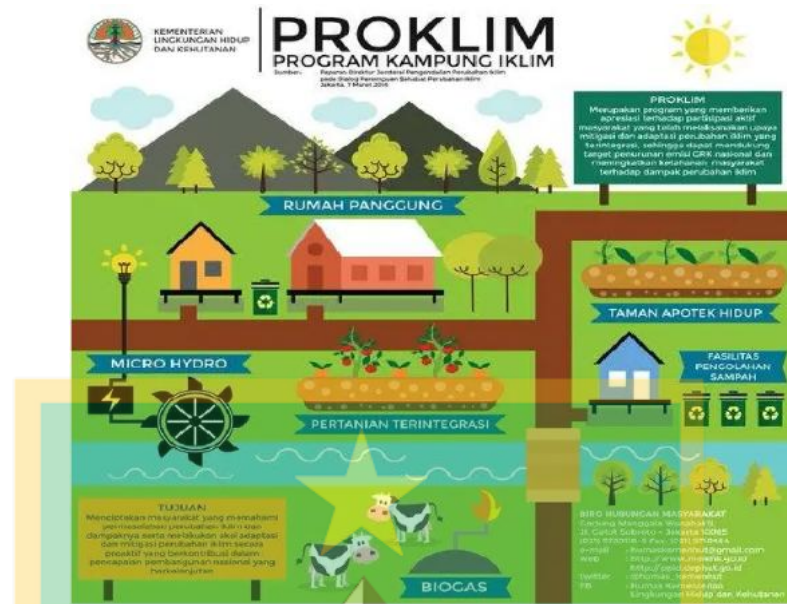
dukungan internasional, Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga mencapai 43%.

Lebih lanjut, Indonesia juga mencanangkan pencapaian kondisi *net zero emission* paling lambat pada tahun 2060, atau bahkan lebih awal apabila memungkinkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara memulihkan lahan vital dan hutan bakau, mengurangi deforestasi, menciptakan energi baru dan terbarukan, serta menurunkan emisi karbon di sektor energi. Dengan Upaya tersebut Indonesia melampaui target dengan berhasil memangkas 118 juta ton emisi karbon dioksida pada tahun 2022, untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, pemerintah juga mendorong kerja sama lintas sektor yaitu sektor pemerintahan desa, bidang kehutanan, serta sektor perkebunan (Bambang Sueprijanto, 2015).

Terkait hal tersebut, Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim yang berbasis partisipasi masyarakat, dan diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ketentuan ini sejalan dengan mandat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memuat ketentuan mengenai hak masyarakat, baik dalam hal memperoleh lingkungan hidup yang layak maupun dalam keterlibatan pengelolaannya (Faedlulloh, Irawan, & Prasetyanti, 2019).

Sesuai arahan pemerintah pusat melalui KLHK, kemajuan lingkungan hidup merupakan tugas utama pemerintah di era *open government*, bersama dengan pelaku non-negara lainnya (masyarakat, dunia usaha, serta komunitas dan kelompok masyarakat). Faktor keberhasilan utama inisiatif pengelolaan dan pengendalian lingkungan adalah kemauan politik dan keterlibatan publik dalam kerangka tata kelola lingkungan yang baik. Dengan tujuan untuk pemberdayaan Masyarakat, ProKlim merupakan upaya lingkungan hidup berskala nasional.

Gambar 1 Konsep Program Kampung Iklim



Sumber: Road Map Program Kampung Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menciptakan program ini untuk memotivasi keterlibatan aktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan diarahkan pada pelaksanaan aksi-aksi lokal yang bertujuan menekan tingkat emisi gas rumah kaca serta memperkuat kapasitas adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menerapkan langkah-langkah pelaksanaan ProKlim menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Program ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 mengenai ProKlim, pelaksanaan ProKlim dapat direncanakan dan diimplementasikan oleh daerah administratif dengan cakupan paling kecil setara Dusun, Dukuh, atau Rukun Warga (RW), serta paling luas setingkat Desa, Kelurahan, atau wilayah yang lebih tinggi (KLHK, 2017a).

Berdasarkan data dari KLHK, wilayah seperti Kecamatan mempunyai paling tidak memiliki minimal satu program andalan dalam pelaksanaan ProKlim. Peningkatan kesadaran akan pentingnya tindakan adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal yang tercermin dalam pelaksanaan ProKlim, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah lokasi ProKlim yang terdaftar pada Sistem Registri Nasional (SRN) pengendalian perubahan iklim. Pada tahun 2023, ProKlim menunjukkan kemajuan

yang cukup pesat. Berdasarkan data dari Sistem Registri Nasional (SRN) untuk pengendalian perubahan iklim, tercatat sebanyak 2.490 lokasi yang tersebar di 36 provinsi dan 347 kabupaten/kota telah terlibat dalam program tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 128%, di mana saat itu hanya terdapat 1.092 lokasi yang terdaftar. Tidak hanya jumlah lokasi yang meningkat, tetapi juga wilayah administratif yang terlibat. Pada tahun sebelumnya, yakni 2022 partisipasi tercatat dari 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota. Selain itu, dukungan dari institusi juga semakin menguat. Jumlah lembaga dan pelaku usaha yang berperan sebagai pendukung ProKlim bertambah dari 11 pada tahun 2022 menjadi 23 institusi pada tahun 2023. Dengan adanya peningkatan maka mendapatkan penghargaan ProKlim yang terdiri dari total 26 lokasi ProKlim Lestari, terdapat 55 lokasi ProKlim Utama yang menerima trofi, sertifikat, dan insentif. Selain itu, sebanyak 442 lokasi mendapatkan Sertifikat ProKlim Utama, dan 10 lokasi lainnya menerima apresiasi dalam bentuk Penghargaan Pendukung ProKlim. diberikan kepada 23 lembaga/badan usaha dan 55 penghargaan Pengembangan ProKlim Kabupaten/Kota di tingkat provinsi (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2023).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, terus mengembangkan inisiatif lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui kegiatan seperti ProKlim dan pelatihan pengelolaan sampah plastik, serta penyuluhan lingkungan, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim. DLH juga membangun kerja sama lintas sektor termasuk pemerintah, warga, dan pelaku usaha, guna mendukung langkah nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pembersihan aliran sungai. Serangkaian program ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Barat (Dlh Jawa Barat, 2021).

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok turut mengalami konsekuensi dari fenomena perubahan iklim, yang ditandai oleh meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, serta fluktuasi suhu yang tidak menentu. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok menunjukkan komitmennya melalui keterlibatan

aktif dalam pelaksanaan ProKlim sebagai bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Upaya ini turut diiringi dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan iklim. Sejumlah Rukun Warga (RW) di wilayah administratif Kota Depok telah tercatat sebagai peserta aktif dalam program tersebut, menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

ProKlim yang digagas oleh KLHK mulai diimplementasikan di Kota Depok sejak tahun 2012 melalui koordinasi DLHK. Dalam rangka mendukung implementasi tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus di setiap kelurahan, dengan total anggaran mencapai Rp6,3 miliar pada tahun 2023. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain penghijauan lingkungan, pembuatan lubang resapan dan sumur infiltrasi, pengelolaan limbah domestik secara terintegrasi, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan rumah tangga, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan (Depok Pos, 2023).

Tabel 1. Total Data ProKlim di Kota Depok

No	Nama Kab/Kota	Nama Instansi	Nama Data	Hasil	Tahun	Satuan
1	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	2	2019	Lokasi
2	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	3	2020	Lokasi
3	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	2	2021	Lokasi
4	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	2	2022	Lokasi
5	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	63	2023	Lokasi
6	Kota Depok	DLHK	Lokasi ProkLim di wilayah Kab/Kota	63	2024	Lokasi

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data yang didapatkan

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, Kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan ProKlim, yang mencerminkan adanya kesiapan serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program tersebut. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan persiapan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, sehingga implementasi ProKlim di Kota Depok dapat dikategorikan efektif dan relatif merata di berbagai wilayah. Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 63 lokasi ProKlim yang berfungsi secara aktif dan tersebar di tingkat RW dan kelurahan di seluruh Kota Depok (Satudata Depok, 2025). Salah satu wilayah yang turut melaksanakan ProKlim adalah Kecamatan Beji, yang memiliki karakteristik kepadatan penduduk cukup tinggi dengan variasi sebaran di setiap kelurahannya, sehingga menjadikan wilayah ini relevan sebagai bagian dari upaya penguatan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Tabel 2. Total Data Penduduk Kecamatan Beji

Kelurahan (Subdistrict)	Penduduk (Population)		Jumlah (Total)
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	
Beji	24.451	24.601	49.052
Beji Timur	5.746	5.742	11.448
Kemirimuka	16.052	16.400	32.452
Pondok Cina	6.235	6.367	12.602
Kukusan	9.428	9.469	18.897
Tanah Baru	18.421	18.101	36.522
Kecamatan Beji	80.333	80.680	161.013

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data yang didapatkan

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk keseluruhan mencapai 161.420 jiwa, yang terdiri atas 80.691 jiwa penduduk laki-laki dan 80.729 jiwa penduduk perempuan. Jika dianalisis berdasarkan wilayah kelurahan, Kelurahan Beji merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 49.052 jiwa. Posisi berikutnya ditempati oleh Kelurahan Tanah Baru dengan jumlah penduduk 36.522 jiwa, kemudian Kelurahan Kemirimuka dengan total 32.452 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Kukusan memiliki jumlah penduduk 18.897 jiwa dan Kelurahan Pondok Cina sebanyak 12.602 jiwa. Adapun jumlah

penduduk paling rendah tercatat di Kelurahan Beji Timur, yakni 11.448 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang (Statistik & Depok, 2025).

Kondisi ini menegaskan bahwa Kecamatan Beji merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan kelurahan lainnya di wilayah tersebut. Tingginya kepadatan penduduk berimplikasi langsung terhadap berbagai tantangan lingkungan, seperti meningkatnya volume limbah domestik, potensi banjir akibat berkurangnya area resapan air, penurunan kualitas udara, serta kenaikan suhu permukaan akibat tingginya aktivitas manusia dan pembangunan yang masif. Meskipun demikian, efektivitas implementasi program sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, khususnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator utama dalam penyelenggaraan program. Kecamatan Beji dipilih karena memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

ProKlim merupakan program nasional yang mendorong keterlibatan aktif penduduk setempat berperan dalam menyesuaikan diri terhadap konsekuensi perubahan iklim dan mengurangi hasil buangan gas yang memicu perubahan iklim. Di daerah padat seperti Kecamatan Beji, implementasi ProKlim berperan penting dalam memperkuat ketahanan komunitas melalui berbagai kegiatan berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah dari sumbernya, pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan (*Urban Farming*), konservasi air dengan sumur resapan dan biopori, serta penghijauan dengan penanaman vegetasi. Kegiatan ini tidak hanya mendorong kesadaran ekologis masyarakat, tetapi juga membangun kemandirian dalam menghadapi tekanan lingkungan. Pelibatan masyarakat secara langsung membuat ProKlim efektif dalam memperkuat resiliensi terhadap perubahan iklim dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ProKlim di Kecamatan Beji layak dijadikan sebagai program prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh.

Melihat berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan ProKlim, khususnya di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok, dapat dipahami bahwa keterlibatan pemerintah otoritas turut andil besar dalam menjamin keberhasilan program yang ada. Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan dukungan kebijakan dan pendanaan, tetapi juga berperan dalam membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan di tingkat lokal. Dikarenakan Kecamatan Beji merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, penurunan kualitas udara, dan meningkatnya suhu lingkungan. Kondisi ini membuat pelaksanaan ProKlim menjadi sangat relevan dan krusial sebagai langkah adaptif maupun mitigatif terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Melalui kontribusi aktif warga, pemanfaatan sumber daya lokal, serta peran fasilitatif dari pihak kelurahan dan dinas terkait, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Meskipun Program Kampung Iklim (ProKlim) telah dilaksanakan sebagai kebijakan nasional yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, implementasinya di tingkat lokal menunjukkan variasi dalam efektivitas pelaksanaan. Peran pemerintah daerah belum selalu berjalan secara optimal dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan.

Dengan demikian, peneliti merasa penting untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Menciptakan *Smart Environment* Melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kecamatan Beji”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung implementasi ProKlim, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan program, hingga keterlibatan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang administrasi publik dan tata kelola lingkungan, tetapi juga menjadi masukan yang bernilai bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Menciptakan *Smart Environment* Melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kecamatan Beji?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Menciptakan *Smart Environment* Melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kecamatan Beji.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam memperdalam pemahaman terkait peran pemerintah lokal dalam mengelola lingkungan yang berorientasi pada partisipasi komunitas. Hasil dari penelitian ini juga berpotensi menambah basis pengetahuan ilmiah dalam ranah kebijakan publik, terutama yang menyangkut kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Depok guna mengoptimalkan pelaksanaan ProKlim. Informasi yang diperoleh dari lapangan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat dalam rangka peningkatan keberlanjutan kegiatan lingkungan di tingkat lokal.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam peran pemerintah daerah dalam mendukung ProKlim di Kecamatan Beji Kota Depok, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang hendak diselesaikan, sasaran yang ingin dicapai, manfaat penelitian dari sisi teori dan praktik, serta ringkasan sistematika penelitian dari proposal ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, termasuk hasil dari penelitian terdahulu yang membahas keterlibatan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan ProKlim

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, mencakup lokasi dan waktu pelaksanaan, metode pengumpulan data (meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi), teknik analisis data, serta langkah-langkah untuk menjamin validitas data yang diperoleh selama kegiatan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti melakukan pembahasan dan analisis mendalam terhadap penelitian yang menjadi fokus keberhasilan dalam karya tulis ilmiah tugas akhir serta menjadi temuan dari hasil penelitian mengenai *Smart Environment*: Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Implementasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Beji.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan mendalam serta menjabarkan saran dan rekomendasi untuk peningkatan strategi yang nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

